

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Medpress Digital. Yogyakarta
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Budi Parmono, 2011, "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum UB, Malang.
- Dudu Duswara Machmuddin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung.
- Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan.
- Encik M Fauzan. 2017. *Hukum Tata Negara*. Setara Press. Malang
- Ismail N. 2017. *Etika Pemerintahan (Nama, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan)*. Tim Lintang. Yogyakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Kencana Prenada Media Group, Depok, Cet. Ke-2.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Kamaruddin Sellang, 2019, *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*, Ombak, Yogyakarta.

- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nandang Alamsah, dkk, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, UNPAD Press, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-7.
- Philipus M Hadjon (dkk), 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introducti on to The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philiphus M. Hadjon (et.al.), 2012, *Hukum Admnistrasi dan Good Governace*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan Perumusan Implementasi Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Aministrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Ridwan, H.R., 2014, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yokyakarta.
- Safri Nugraha (et.al.), 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Center for Law and Good Governance Studies FH UI, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, "Metode Penelitian Hukum". Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susi Moeimam dan Steinhauer, Hein, 2005, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Wildan Suyuti M. 2013. *Kode Etik Hakim*. Kencana Prenadamaedia Group. Jakarta

**JURNAL:**

Andi Izman Maulana P, 2015, “Efektivitas Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Bahder Johan Nasution, “Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2 2006.

Elim Riedel Cp. Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya. Lex Administratum. Vol. 4 Nomor 4 September-Desember 2018

Lukman Hakim, “Kewenangan Organ dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Widyagama Malang, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2011.

Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18 Nomor 2 Juni 2018.

Nurul Qamar, Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Ilmu Hukum, Makassar, 2014.

Tedi Sudarajat, Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Civil Service, Vol. 11 Nomor 2, November 2017.

Wahyu Ramdhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dien”, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Yudi Widyo Armono, “Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang”, Prosiding Seminar Unsa, Vol. 1 Nomor 1 Desember 2014.

**THESIS:**

Mahanani, T,2016, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Pemerintah Kabupaten Jepara, Thesis Fakultas Hukum Unissula. Program Magister, Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

**ARTIKEL MAJALAH ILMIAH:**

Arfan Faiz, Muhlizi, "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", Artikel dalam Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1 Nomor 1 Januari-April 2012.

Iskandar, "Keabsahan Tindakan Pemerintahan", Artikel Analisis Yuridis, September 2013.

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Akibat Hukum", Web Hukum, Februari 2019.

Ferianto, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Puskesmas Terpencil", Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021.

Ida Zuraida, Quo Vadis: Penegakan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana, Artikel Sependikum, Hlm. 70.

Rais Martanti, "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," Artikel DJKN, Direktorat Hukum dan Humas, September 2016.

Sinulingga, E. C (et.al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan Nomor: 79/Pid. Sus. Tpk/2017/Pn. Mdn). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Volume 1 No. 1, Mei 2021.

Yudhi Widyo Armono, "Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang", In Seminar Korupsi, Surakarta University, 2014.

Yulius, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014)", Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Vol. 04 Nomor 3 November 2015.

**KAMUS:**

Ebta Setiawan, 2012, Kamus Bebas Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

<https://kbbi.web.id.pejabat>, diakses pada 25 Maret 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud).

Susi Moeimam dan Steinhauer Hein. 2005. Kamus Belanda-Indonesia. Gramedia Pustaka. Jakarta

Wiktionary, 2011, Kamus Indonesia, Wiki Media Project.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Latemmamala Pada Dinas Kesehatan

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Laboratorium Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Di Kabupaten Soppeng

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/234/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji *Real Time-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) SARSCoV-2 Bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium Lain yang Melakukan Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).